

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL**

**(Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003-2011)**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

**AGUSTINA WULANDARI**

**B 200 090 142**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:  
**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL**

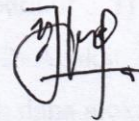
(Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003-2011)

Yang ditulis oleh AGUSTINA WULANDARI NIM: B 200090142

Penandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk  
diterima.

Surakarta, .....2013

Pembimbing



(Dra, Nursiam Ak, MEd)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, Msi.)

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL**

**(Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003-2011)**

**AGUSTINA WULANDARI**

**B 200 090 142**

**ABSTRAKSI**

otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22/1999 (direvisi menjadi UU No. 33/2004) tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan. Pada pemerintah, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik.

Perumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut : 1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ? 2) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ? 3) Apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ?

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 2) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 3) Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Statistik deskriptif, 2) Regresi linear berganda, 3) Uji Normalitas, 4) Uji Multikolinearitas, 5) Uji Heteroskedastisitas, 6) Uji Autokorelasi, 7) Uji F, 8) Uji t, 9) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh  $F_{hitung}$  8,708 dengan nilai signifikansi 0,020, maka  $H_0$  diterima sehingga secara bersama-sama ada pengaruh signifikan PDRB, PAD dan DAU. 2) Dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  untuk variabel PDRB sebesar 0,025, PAD sebesar 0,840 dan DAU sebesar

0,011, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB dan DAU berpengaruh signifikan, sedangkan variabel DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal kabupaten Sragen. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai *Adj R<sup>2</sup>* sebesar 0,743 hal ini menunjukkan bahwa 74,3% variasi dari belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, PAD dan DAU , sedangkan sisanya 25,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22/1999 (direvisi menjadi UU No. 33/2004) tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan. Pada pemerintah, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik.

Menurut Nordiawan et al (2007:39-43) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi, efektivitas perekonomian dan harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Berlakunya Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan dana subsidi atau ganjaran. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003-2011)”**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten Sragen.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Suparmoko (2002:26) anggaran pendapatan belanja daerah adalah suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan dimasa akan datang yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi

sebagai berikut: 1) Fungsi otorisasi, 2) Fungsi perencanaan, 3) Fungsi pengawasan, 4) Fungsi alokasi dan distribusi.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Penelitian Maryanti dan Endrawati (2009) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahunnya sedangkan PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan di suatu daerah.

Menurut Boediono (2002:7), perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan produksi, didalam pendekatan ini PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam sektor Sembilan lapangan usaha yaitu: pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; gas, listrik dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; jasa keuangan, persewaan dan perusahaan dan jasa-jasa.
- b. Pendekatan pendapatan, menurut pendekatan pendapatan PDRB adalah penjumlahan semua komponen terakhir yaitu: pengeluaran semua konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

## **3. Pendapatan Asli Daerah**

Didalam UU No. 32 tahun 2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

PAD yang sah. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang serta memelihara pembangunan yang telah dilaksanakan.

#### **4. Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No. 25/1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yakni potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Rumusan DAU berdasarkan UU No. 25/1999 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk provinsi: jumlah DAU dikalikan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot dari semua provinsi.
- b. Untuk kabupaten/kota: jumlah DAU dikalikan rasio bobot daerah kabupaten/kota bersangkutan terhadap jumlah bobot dari semua kabupaten/kota. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonominya (Tambunan, 2001:255).

#### **5. Belanja Modal**

Menurut Halim (2002:72), belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi dua yaitu belanja publik dan belanja aparatur.

- a. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik adalah:
  - 1) Pembangunan jembatan dan jalan raya.
  - 2) Pembelian alat transportasi massa.
  - 3) Pembelian mobil ambulans

- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur adalah:

- 1) Pembelian kendaraan dinas.
- 2) Pembangunan gedung pemerintahan.
- 3) Pembangunan rumah dinas.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

## **C. METODE PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Periode waktu yang diteliti adalah tahun 2003-2011. Variabel yang diteliti terdiri atas variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal. Pemilihan variabel ini didasarkan pada masih terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal.

### **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sragen dengan alasan untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal selain itu karena lokasi penelitian dekat dengan tempat penulis sehingga memudahkan dalam pengambilan data.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Indriantoro, 1999:147), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

## 2. Sumber Data

Data diperoleh dari sumber instansi yang terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sragen.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) melalui internet dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari laporan realisasi ini diperoleh mengenai jumlah realisasi PAD, DAU dan belanja modal. Data PDRB harga konstan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## **D. HASIL PENELITIAN**

Pengujian model persamaan regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dengan diperoleh hasil model terdistribusi normal, bebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil nilai signifikan sebesar 0,025 lebih kecil dari alpha 5% sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini berarti PDRB (secara statistik) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), yang menyimpulkan bahwa dengan PDRB yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab pemda kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada

masyarakat melalui belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang baik maka pemda akan meningkatkan alokasi belanja modalnya tahun ketahun guna melengkapi saran dan prasarana.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Hasil nilai signifikan sebesar 0,840 lebih besar dari alpha 5% sehingga H2 ditolak. Hal ini berarti PAD (secara statistik) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Sri PujiPaujiah (2008) yang menyimpulkan bahwa PAD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan belanja modal. PAD Kabupaten Sragen relative lebih kecil dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum. Dimana Dana Alokasi Umum masih menjadi dana utama dalam membiayai belanja modal daerah.

## 3. Dana Alokasi Umum

Hasil nilai signifikan sebesar 0,011 lebih kecil dari alpha 5% sehingga H3 diterima. Hal ini berarti DAU (secara statistik) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (diterima). Berdasarkan pengujian statistik untuk Dana Alokasi Umum diperoleh dari nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), serta Hariyanto dan Adi (2006) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima pemda, maka akan semakin meningkat belanja modal pemda tersebut. Hal ini disebabkan

karena peran DAU sangat signifikan sehingga belanja daerah akan ditujukan untuk untuk pemerintah daerah salah satunya belanja modal.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Sragen. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang diperoleh dengan nilai signifikan sebesar 0,025 ( $p = 0,025 < 0,05$ ).
2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Sragen. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang diperoleh dengan nilai signifikan sebesar 0,840 ( $p = 0,840 > 0,05$ ).
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Sragen. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang diperoleh dengan nilai signifikan sebesar 0,011 ( $p = 0,011 < 0,05$ ).

#### **F. SARAN**

1. Bagi peneliti mendatang hendaknya obyek penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten Sragen.
2. Bagi peneliti mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal, seperti ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE UGM.

- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT INDEKS.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*. SNA X Makasar.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Juli 2007.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UGM.
- Khairani, Siti. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada pemerintah Daerah (studi empiris Kabupaten/kota di provinsi Sumatera selatan dan Bangka Belitung)*. Kajian ekonomi Vol.7 No.1 Tahun 2008.
- Maryanti, ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi: studi kasus Sumatera barat*. Jurnal Akuntansi.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.